

**POLITIK IDENTITAS DAN REPRESENTASI POLITIK
(Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)**

Juhana Nasrudin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nasrudin_juhana@yahoo.com

Abstract

Identity and representation are two significant things in human life. While religion and ethnicity are two things that become identity and representation of humans. The democratic process in Indonesia is inseparable from the orientation of identity politics and representation. This research is qualitative in nature which focuses on research in the case of the second round of DKI regional elections in the period 2018-2022. The case will be analyzed using the theory of identity politics and political representation. The results of the study indicate that the orientation of identity politics and political representation influences the democratic process in the case of the 2018-2022 DKI elections.

Key Word: Identity Politic and Representasi Politic

Abstrak

Identitas dan representasi adalah dua hal yang signifikan dalam kehidupan manusia. Sementara agama dan etnis adalah dua hal yang menjadi identitas dan representasi dari manusia. Proses demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari orientasi politik identitas dan representasi. Penelitian ini bersifat kualitatif yang memfokuskan penelitian pada kasus Pilkada DKI periode 2018-2022 putaran kedua. Kasus tersebut akan di analisis menggunakan teori politik identitas dan representasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi politik identitas dan representasi politik mempengaruhi proses demokrasi pada kasus pilkada DKI 2018-20122.

Kata Kunci: Politik Identitas, dan Representasi Politik

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjadi wilayah jalur sutra, berbagai etnis hidup didalam negeri khatulistiwa ini, baik etnis dari luar ataupun dalam negeri itu sendiri. Salah satu etnis yang mendominasi negeri tersebut adalah etnis Tionghoa. Secara historis etnis Tionghoa masuk ke Indonesia pada abad 206 SM - 220 M melalui jalur perdagangan. Bangsa Tionghoa datang bersamaan dengan ekspedisi yang dilakukan oleh laksamana Cheng Ho sebanyak tujuh kali (Yuanzi, 2005:25).

Pembentukan identitas dapat terbentuk baik secara parsial maupun secara interaksial. hal inilah yang akan melahirkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik, sosial itu sendiri dan sosial budaya. Identitas etnis dan agama adalah dua hal yang menjadi elemen perubahan sosial. Proses terjadinya politik identitas keagamaan akan melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial begitupun sebaliknya (Sukanto, 2010:13). Sedangkan adanya politik identitas etnisitas juga secara langsung atau tidak langsung, nyata atau

tersamar melahirkan perubahan sosial. Tidak terkecuali pembentukan, penamaan dan penggunaan identitas melahirkan pula perubahan sosial.

Terjadinya interrelasi antara identitas dan perubahan sosial adalah sebagai sesuatu yang bertentangan, baik secara tersembunyi atau terang-terangan di antara warga, badan publik dan pasar³. Penerapan dan pengaktualisasian identitas pada seseorang dapat saja mencerminkan atau mewakili dirinya sendiri maupun institusi dalam konteks etnisitas dapat terbentuknya masyarakat Jawa, Madura, Bali, Tionghoa, Arab dan sebagainya; dalam konteks agama terjadi dalam Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Tridharma atau Khong Hu Chu. Identitas dalam diri seseorang dapat saja sekaligus mewakili institusi baik itu etnisitas, agama dan nasionalitas (Sukanto, 2010:13).

3 Tiga kekuatan besar inilah yang secara dominan mewarnai realitas kehidupan sehari-hari; warga menunjuk kepada di satu pihak individu dan dilain pihak masyarakat, namun lebih ditekankan yang tidak menyandang peran sebagai badan publik maupun pelaku pasar; badan publik adalah representasi dari state yang dahulu bertugas untuk merealisasi welfare state; pasar adalah pelaku pasar, konglomerasi, baik individu maupun badan-badan usaha; yang menjadi soal justru terjadinya perselingkuhan di antara mereka dapat merusak hubungan dua di antara ketiga kekuatan besar tersebut.

Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi identitas agama dan etnis. Hal ini dapat dilihat pada keikutsertaan partai-partai politik yang mengikuti pemilu atau pilkada sebelumnya. Proses demokrasi

khususnya dalam Pilkada saja seringkali tidak terlepas dari peran serta beragam partai dengan berbagai ideologi yang ikut merongrong. Berbagai ragam identitas agama dan etnis sering kali dijadikan alat politik.

Proses keterlibatan etnis Tionghoa pada perhelatan perpolitikan di Indonesia semakin berkembang dan semakin mendominasi hal ini dapat terlihat jelas di era presiden Jokowi yang berhasil memenangkan pemilu tahun 2014. Identitas Tionghoa pada masa ini mulai mendominasi di berbagai wilayah yang berada di Indonesia. Ada beberapa fakta yang menguatkan pendapat tersebut, seperti pada kasus reklamasi kita dapat melihat bagaimana dominasi etnis Tionghoa memainkan peranan dalam pembangunan reklamasi tersebut. Hal lain yang dapat di jadikan bukti tersebut adalah peranan para etnis Tionghoa yang kebanyakan memegang peranan pada penguatan ekonomi nasional. Salah satu hal yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini adalah diangkatnya Ahok menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi yang pada waktu itu berhenti karena ikut kontestasi politik menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Penguatan identitas politik dan representasi politik secara otomatis muncul sebagai dampak dibukannya kran partisipasi politik yang dimulai sejak era reformasi hingga sekarang (Anas Sabhana dan Suryani, 2016:21). Dalam hal ini seolah terjadi pergulatan antara masyarakat pribumi dan non pribumi. Pilkada DKI pada tahun 2017 yang dimenangkan oleh Anis Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi potret baru bagi pergulatan politik identitas dan representasi politik di Indonesia dimana pada waktu itu yang menjadi lawannya adalah Ahok- Djarot pada pemilihan putaran kedua. Dalam hal ini Ahok-

Djarot menjadi potret identitas dan representasi non muslim dari etnis Tionghoa dan Anis-Sandi menjadi representasi Muslim pribumi.

Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan maka penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan pada kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022 pada putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon Anis-sandi dan Ahok-Djarot. Berdasarkan pada fokus permasalahan tersebut di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan pokok penelitian dalam penelitian ini adalah, apakah orientasi politik identitas dan representasi politik berpengaruh terhadap Pilkada DKI periode 2018-2022 terutama pada putaran kedua?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode pengumpulan data *library research*. Data-data dalam penelitian ini diambil dari sumber kedua, yaitu dari sumber buku-buku, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel dan opini media cetak lokal yang ada di Indonesia. yang diambil melalui website dan sumber dokumen tertulis lain, yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan data untuk bisa dianalisis dalam penelitian ini. Kemudian data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber berupa buku-buku teks, e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel dan opini di

Yang dimaksud dengan sumber tertulis lain ialah sumber yang bukan dari internet tetapi sumber tersebut terkait dengan masalah penelitian. Media cetak, website dan sumber dokumen tertulis lain dianalisis melalui pendekatan konten analisis data yang kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut.

LITERATUR REVIEW

Politik Identitas

Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula dari upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatistis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

Sedangkan Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis (Cressida Heyes, 2007). Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Jika dicermati Politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari

biopolitik yang berbicara tentang satu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender. (Hellner, 1994:4). Menurut Agnes Heller politik identitas adalah gerakan politik yang focus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama.

Namun, dalam perjalanan berikutnya, politik identitas justru dibajak dan direngkuh oleh kelompok mayoritas untuk memapankan dominasi kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, yang justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian itu, bukan berarti tidak menuai kritik tajam. Politik identitas seakan-

Akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.

Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bias dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing.

Jadi secara umum teori umum politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (*salient*)

untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. *Pertama*, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. *Kedua*, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilihan umum, termasuk pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertarungan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertarungan.

Representasi Politik

Menurut Nuri Suseno dalam bukunya yang berjudul *Representasi Politik*, bahwa perkembangan representasi politik dapat diamati sejauh mana keberadaan Negara dalam pelaksanaan demokrasi yang sangat dipengaruhi oleh perubahan fenomena politik. Viera dan Runciman mengatakan bahwa semua negara modern saat ini merupakan negara perwakilan. Representasi yang secara sederhana diartikan "menghadirkan yang tidak ada atau yang tidak hadir" berubah untuk memahami praktik politik demokrasi (Nuri Suseno, 2013:16).

Pada awalnya, menurut Hanna Pitkin representasi sepanjang sejarah tidak ada hubungan dengan demokrasi, ahkan tidak identik dengan demokrasi itu sendiri. Demokrasi dipandang sebagai pemerintahan rakyat sedangkan representasi adalah

menghadirkan yang tidak hadir. Tentunya ini sangat berlawanan. Demikian pula yang dikatakan Benard Manin dalam *The Principles of Representative Government* (1997), pemerintahan perwakilan tidak sama dengan demokrasi (Nuri Suseno, 2013:26).

Menurut perspektif Manin dalam melihat *state* dan *civil* sebagai representasi politik dari perspektif demokrasi, lembaga yang dipandang sentral didalam pemerintahan perwakilan adalah "*election*" atau pemilihan dengan *distinction*. Sehingga dari *election* lahirlah wakil-wakil politik. Menurut Hanna Pitkin, dikatakan layak seseorang wakil dalam perspektif demokrasi adalah (1) *authorization* (otorisasi), (2) *substantive acting for* (tindakan mewakili dalam artian sesungguhnya), dan (3) *accountability* (pertanggungjawaban atau penanggungugugatan). Dari sini, paradigma yang semula menentang antara representasi dengan demokrasi berbeda dapat menemukan benang merahnya (Nuri Suseno, 2013:30-31)

Representasi politik dari perspektif demokrasi cenderung dinamis, sebagaimana yang diungkap oleh Laura Montanaro. Montanaro melihat representasi politik dari intuisi normative demokrasi, bahwa representasi tidak harus dari *election* (representasi electoral) tetapi adanya *self appointed representation* yang berasal dari individu, kelompok masyarakat non pemerintahan (lokal, nasional, atau global). Demokrasi yang inklusif memungkinkan representasi politik yang tereksklusikan untuk hadir dan terwakili diarena pengambilan keputusan.

Representasi politik sering dipahami sebagai keterwakilan suatu pihak atas pihak lain. Namun konsep ini

bukan berarti menjadi konsep mutlak dari representasi. Seperti yang tercantum dalam kutipan berikut:

...the very notion of representation tells us that the represented is not present. Prevailing conceptual definitions in any period are shaped by its advocates who are themselves formed by their political representation is both contingent and contested, a complex combination of elements that is ill-suited to simple definition or application... (...gagasan representasi menunjukkan bahwa pihak yang direpresentasikan tidak hadir. Definisi-definisi konseptual yang ada dalam suatu periode dibentuk oleh para penganjurnya, mereka sendiri dibentuk oleh konteks dan prioritas politik pada masanya. Makna representasi politik, dengan demikian, [bersifat] sementara dan dapat diperdebatkan, sebuah kombinasi yang kompleks dari unsur-unsur yang kurang cocok bagi definisi atau penerapan yang sederhana...). (Nuri Suseno, 2013:25)

Kutipan diatas menunjukkan bahwa konsep dari representasi politik tidak mudah dipahami dan didefinisikan secara universal. Hal ini dikarenakan ada banyak perdebatan mengenai makna dari representasi politik. Representasi politik terlalu kompleks dan terdiri dari unsur-unsur yang sukar untuk didefinisikan. Representasi politik tidak hanya seputar wakil dan pihak yang diwakilinya, namun lebih dari itu.

Menurut Hanna Pitkin, setidaknya ada 4 pandangan berbeda tentang representasi yakni formal, substantif, simbolis dan deskriptif. Pandangan formal dan deskriptif melihat representasi pada *way of acting* atau *acting for*. Sedangkan pandangan simbolis dan substantive memandang dari *way of being* atau *standing for*. Gambaran representasi dari Pitkin

sendiri dianggap representasi tradisonal karena fokus yang kuat pada pemilu baik pada gagasan maupun praktik serta fokus yang kuat pada karakter dan penampilan perwakilan dari wakil disatu sisi dan mengabaikan yang diwakili disisi lainnya (Nuri Suseno, 2013:33-34).

Perkembangan representasi dan election haruslah dikaitkan dengan state dan civil serta the people menurut Urbinati. Sehingga diperlukan pembenahan pada institusi- institusi representasi politik. Teori representasi politik ini tidak semata dikaitkan dengan agen-agen atau institusi- institusi pemerintahan tetapi memandang representasi politik sebagai bentuk proses politik yang terstruktur dalam hubungan diantara institusi- institusi dan masyarakat sehingga dengan demikian tidak terbatas hanya pada pemusyawarahan atau pengambilan keputusan didalam majelis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meritokrasi Politik dan Politik Identitas di Indonesia

Pelaksanaan Pilkada DKI 2017 yang sudah berlalu, merupakan potret yang menunjukkan dimana politik identitas yang cenderung mengarah ke isu suku, agama dan ras. Peranan suku, agama dan ras berperan sangat kuat bahkan terkristalisasi sedemikian rupa sehingga memberikan tekanan psikologis kepada masyarakat pemilih. Proses politik semacam itu disadari atau tidak akan menggerus dmokratisasi di Indonesia.

Melihat fenomena tesebut, maka tidak dapat dipungkiri lagi Hal lain yang juga perlu dicermati adalah masalah mikro politik yaitu relasi-relasi penguasaan dalam praktek kehidupan

sehari-harinya mengaku sebagai rezim kebenaran yang dikelola secara terstruktur dan diikuti sertakan dengan membangkitkan emosi masyarakat sehingga terjadi marjinalisasi sampai munculnya label "the other", seperti; perbedaan agama, perbedaan gender, perbedaaan etnis dll.

Bahkan keberhasilan penerapan politik identitas di DKI pada Pilkada 2017, telah menjadi raw model bagi beberapa daerah untuk menggunakan politik identitas sebagai pondasi utama bagi setiap kontestan untuk memenangkan pertarungan politik formal dan informal. Partai-partai sudah tidak lagi menjadi representasi dan wadah maupun alat untuk poses konsolidasi, dan komunikasi. Mendominasinya politik identitas dalam ruang publik yang sehari-hari sekarang terjadi dengan gelombang yang begitu besar di media sosial bukan hal yang patut dirayakan, karena sepertinya media sosial juga turut andil terjadinya segregasi sosial secara horizontal yang makin melebar.

Praktek demokrasi di Indonesia sepertinya telah beralih menjadi perlombaan yang tak mengenal kawan maupun lawan, semuanya dijalankan secara *oligarchic democracy* yang sangat akrab dengan politisasi bertendensi SARA dan memecah belah.Sentimen terhadap etnis minoritas yang terjadi hingga kini bisa jadi merupakan rekayasa sosial yang dikonsepsikan oleh kelompok tertentu untuk menarik simpati masyarakat

Bahaya dari politik identitas yang berlebihan adalah bisa berujungnya pada fasisme, bahkan lebih buruk lagi yaitu separatisme dan masyarakat yang sudah terasimilasi berdasarkan identitas tertentu, dapat dengan mudah dimobilisasi oleh kelompok yang ingin mencapai agenda

politiknya. Politik identitas yang dijalankan oleh kelompok tertentu, berupaya memunculkan negara yang mono- identitas. Masyarakat Indonesia seakan dibuat hilang ingatan akan sejarah keragaman yang dimilikinya.

Secara singkat, politik identitas tak bisa dilawan dengan politik identitas "yang lebih lunak". Ia harus dilawan dengan politik yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Hal lain yang juga perlu disikapi adalah jangan agama dibawa-bawa pada ranah politik. Agama cukup sebagai keyakinan hidup dan pedoman moral, baik dalam ranah individu maupun sosial, karena ajaran agama menekankan keimanan, ritual peribadatan, dan moralitas, Sedangkan politik menekankan aturan main dalam perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara, karena apabila agama digunakan sebagai sentimen primordial dan etnisitas demi kepentingan politik, maka yang terjadi adalah politisasi agama yang berpotensi terjadinya kekerasan komunal secara horizontal, dan akibatnya spirit demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan susah payah oleh kekuatan rakyat pada tahun 1998 akan sia-sia. Dilain pihak peran para pemimpin agama baik dari agama islam, protestan, katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu secara serempak bahu membahu harus mengarahkan umatnya untuk tidak terjebak dalam politisasi agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu demi memenuhi syahwat politik kekuasaannya.

Persaingan Identitas Ekonomi-Politik, Agama dan Etnis Pada Pemilihan DKI

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang telah lalu merupakan sebuah fenomena

politik yang menarik untuk dikaji. Proses demokrasi tersebut menjadi ajang pertarungan calon gubernur (cagub) paling panas dan menghebohkan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan lebih cermat pada kasus tersebut, diantaranya terkait dengan faktor ekonomi yang turut ikut serta mempengaruhi berjalannya pelaksanaan demokrasi di ibu kota tersebut.

Jika didasarkan pada sejarah Nusantara, agama Islam yang menjadi keyakinan mayoritas penduduk pribumi dibawa oleh para saudagar Arab pada abad ke tujuh Masehi setelah sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Hindu-Budha yang dipengaruhi oleh India di abad pertama Masehi. Gelombang kedatangan orang India dan Arab ke Nusantara menjadi titik awal tumbuhnya populasi keturunan mereka di Indonesia hingga saat ini, termasuk imigrasi besar ras Mongoloid-Tiongkok. Pada era kolonial, para pedagang Tionghoa bersama Arab dan India memegang peranan besar dalam perdagangan Nusantara, khususnya di Batavia. Awalnya, orang Cina datang dan menetap di Nusantara sebagai buruh dan pekerja yang dibawa oleh VOC dan Inggris, kemudian Belanda mengangkat kelas sosial orang Cina setara dengan orang India dan Arab sebagai perantara dagang Belanda dengan pribumi.

Jakarta merupakan pusat perdagangan dan perekonomian bagi kaum imigran. Sebagian besar wilayahnya diduduki oleh etnis keturunan Cina, diikuti Arab dan India. Etnis Cina dan Arab bahkan memiliki perkampungan sendiri di Jakarta. Kawasan pemukiman warga etnis Cina disebut pecinan. Etnis Cina menempati wilayah yang dipercaya sebagai jalur naga mulai dari Kelapa Gading, Sunter,

Keramat Luar Batang, dan Pluit di Jakarta Utara, sampai di Glodok, dan Jakarta Kota di Jakarta Barat. Etnis Arab punya kampung sendiri di Condet Jakarta Timur dan etnis India banyak bermukim di rumah susun Bandar Kemayoran Jakarta Pusat.

Lantaran banyaknya warga etnis Cina dan Arab di Jakarta, hal ini yang menjadi kekuatan primordial bagi cagub DKI Jakarta Ahok dan Anis Baswedan. Identitas Ahok sebagai cagub keturunan Cina akan mendapatkan dukungan dari warga Jakarta etnis Cina, begitu pula dengan Anis Baswedan yang merupakan keturunan Arab sudah pasti akan didukung oleh mayoritas warga Condet, selain masing-masing memiliki basis dukungan pemilih beridentitas rasional. Sementara Agus Yudhoyono hanya berpotensi mendapatkan dukungan dari pemilih rasional.

Latar belakang identitas yang berbeda dari kedua cagub, memberikan gambaran polarisasi dukungan dan kekuatan finansial yang berbeda. Ahok pasti akan didukung oleh para pengusaha atau taipan Cina yang hampir menguasai perekonomian Indonesia, khususnya Jakarta. Etnis Arab, sebenarnya tidak memiliki riwayat solidaritas seperti etnis Cina, sehingga dukungan finansial dari Arab lokal tidak begitu meyakinkan, tetapi faktor PKS sebagai partai pengusung akan menjadi perantara donasi Arab untuk Anis Baswedan karena PKS memiliki kedekatan dengan Kerajaan Arab Saudi dan Gerakan Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin di berbagai negara Timur Tengah. Oleh karena itu, Pilkada DKI Jakarta akan menjadi ajang pertarungan identitas yang memiliki kekuatan besar di belakangnya, yaitu antara Tiongkok dengan Timur Tengah.

Secara politik, identitas itu mungkin tidak akan ditunjukkan di permukaan oleh para cagub karena tidak menguntungkan dan sangat sensitif. Tetapi pada tataran praktis diakui atau tidak dominasi identitas diantara kedua cagub akan tampak terlihat. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan beberapa fenomena yang terjadi menjelang pilkada, seperti kasus yang menjerat Ahok yang disusul dengan demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam yang dikenal aksi damai 212. Dari fakta tersebut terlihat identitas itu eksis, menguat, dan berpotensi terus dikonstruksi untuk mendapatkan keuntungan lain, misalnya dukungan finansial. Identitas tersebut tidak begitu saja hadir, tetapi melalui proses panjang yang memungkinkan untuk diidentifikasi dalam proses pembentukan. Identitas itu terbentuk melalui artikulasi dan pilihan posisi cagub-cawagub, termasuk penetrasi modal dan juga dominasi struktural partai pengusung.

Identitas yang terbentuk dari pola primordial tersebut secara historis sudah lama menjadi solidaritas kolektif yang saling berlawanan. Identitas kolektif akan menjelaskan bagaimana suatu kelompok menciptakan, memperkenalkan, dan mempertahankan identitas kelompoknya sebagai sebuah hal yang prestise untuk melawan kelompok lainnya. Pertarungan panjang terjadi antara Amerika dengan Cina yang merupakan perseteruan ideologi kapitalisme dengan komunisme yang berujung pada sentimen identitas. Berbagai kerusuhan anti Cina di Indonesia merupakan kulminasi dari ketidaksukaan Amerika dan negara-negara Eropa dengan komunis Cina melalui tangan penduduk setempat.

Keberadaan etnis cina atau tionghoa menyimpan sejarah kelam pada masa dulu ketika kerusuhan anti Cina pernah terjadi di Batavia tahun 1740 yang dikenal sebagai Geger Pacinan atau Tragedi Angke yang menelan korban lebih dari 10.000 orang Cina. Peristiwa rasialis 10 Mei 1963 di Bandung yang merembet ke berbagai kota di Jawa Barat, tahun 1972 di Pekalongan, tahun 1973 di Jakarta, Palu dan Bandung, peristiwa Malari tahun 1974, tahun 1980 di Ujung Pandang, Solo dan Medan, tahun 1995 di pekalongan, Kerusuhan sepanjang tahun 1997 hingga tahun 1998 di berbagai tempat yang berujung pada kerusuhan Mei 1998. Hal ini rupanya berdampak pada proses pembentukan etnis tionghoa yang secara strotipe dari etnis lain yang non tionghoa. Jika diamati lebih seksama rupanya masalah ini berpengaruh terhadap proses Pilkada DKI pada putaran kedua.

Dari semua etnis yang pernah ada di Indonesia, etnis Cina paling sering menjadi korban kemarahan pribumi. Hal itu terjadi karena sentimen identitas diciptakan oleh Belanda dengan membuat undang-undang kependudukan yang memposisikan warga pribumi sebagai inlander, atau warga negara kelas rendah, sementara Cina menduduki kelas atas dan mendapatkan akses ekonomi yang tidak diberikan kepada penduduk pribumi. Perlakuan diskriminatif tersebut membuat masyarakat pribumi memendam kemarahan terhadap etnis Cina, sehingga kapan pun bisa disulut oleh pihak luar seperti Amerika yang memang tidak suka dengan Cina menjadi kerusuhan rasial.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi pada proses Pilkada DKI adalah faktor agama. Walaupun peranan agama bukan hal yang

signifikan dalam proses Pilkada tersebut. tetapi Agama seringkali dijadikan alat politisasi yang ampuh untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan pilihannya. Jika didasarkan pada kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pilkada Jakarta 2017 menunjukkan adanya peningkatan intensitas kampanye berbasis politik identitas, khususnya etnis dan agama. Sementara pemilih yang memilih didasarkan agama hanya 3,6%. (Kompas.com, 2017).

Dengan demikian kita dapat melihat ada orientasi politik yang mengarah kepada identitas ekonomi, agama dan ras. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Pilkada DKI pada putaran kedua yang dimenangkan oleh Anis-sandi. Hal tersebut tidak luput dari pengaruh politik identitas primordial terkait etnis tionghoa dan agama. Ada beberapa fenomena yang melatarbekangi naik turunnya elektabilitas calon kandidat yang maju putaran kedua. Jika dicermati masing-masing dari kedua pasangan calon keduanya memerankan identitas masing-masing. Pasangan kandidat Ahok-Djarot memainkan identitas tionghoa dan sekaligus menjadi representasi dari ekonomi, ras dan Agama tionghoa yang beragama katolik. Pasangan tersebut mengalami penurunan elektabilitas ketika dihadapkan pada kasus ahok yang terjerat hukum penistaan agama. Sedangkan pasangan Anis-Sandi mereka memerankan identitas ekonomi, ras dan agama Islam. Secara ekonomi, etnis dan agama Anis-Sandi merepresentasikan bangsa arab.

Stereotipe Publik Terhadap Para Calon Gubernur DKI

Faktor lain yang dapat diamati dalam kasus Pilkada DKI adalah adanya faktor stereotipe dari publik

terhadap pasangan kandidat Ahok-Djarot, terutama Ahok yang merupakan keturunan ras Tionghoa dan non muslim, kemudian Anis-Sandi, Anis yang merupakan keturunan Arab. Fakta lain yang mempengaruhi elektabilitas ahok adalah tidak sedikit publik yang menilai Ahok sebagai orang yang arogan dan kasar walaupun terkadang kekasaran itu dimaknai sebagai ketegasan Ahok hal ini yang kemudian dinamakan dengan faktor stereotipe yang mempengaruhi pada elektabilitas para kandidat Pilkada DKI tersebut.. Secara teoritis stereotype adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotipe merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat.

Representasi Politik dalam Pilkada DKI

Selain dari penguatan politik identitas pada proses Pilkada DKI, maka dapat diketemukan juga sebuah representasi politik yang ikut mewarnai proses demokrasi tersebut. Jika kita mau menyelusuri media sosial, maka kita akan menemukan bagaimana proses artikulasi dan agregasi kepentingan publik kini sudah mulai difasilitasi dalam berbagai perbincangan di grup-grup percakapan. Penyebaran berbagai konten informasi secara tidak langsung ikut menyuburkan kampanye politik identitas. Seringkali, pesan yang hendak disampaikan bersembunyi di balik wacana soal ketidakadilan, diskriminasi, dan pemihakan pada golongan minoritas.

Representasi politik dalam pilkada DKI dapat terlihat lebih jelas jika dicermati lebih mendalam. Hal itu dapat dianalisis dari siapa saja partai pendukung pasangan calon kandidat dan bagaimana karakternya. Seperti halnya Ahok-Djarot yang merepresentasikan dirinya sebagai partai-partai yang berafiliasi dengan kaum tionghoa sementara Anis-Sandi merepresentasikan dirinya sebagai partai-partai yang berafiliasi dengan kaum Arab atau Timur Tengah.

Pengaruh Identitas Etnis dan Agama Pada PILKADA DKI 2017

Alasannya, para pemilih DKI adalah pemilih yang lebih rasional, terdidik, dan lebih kritis. Memang, dari segi pendidikan, pemilih Jakarta sekitar 45-50 persen berpendidikan SLTA dan sekitar 20-25 persen berpendidikan perguruan tinggi. Profil pendidikan ini jauh lebih baik dibanding rata-rata daerah lain. Akses pemilih Jakarta kepada informasi juga jauh lebih besar karena relatif tak ada bagian Jakarta yang sulit diakses. Anggapan umum mengatakan, pemilih yang rasional, terdidik, dan kritis memiliki kecenderungan memilih dengan alasan-alasan yang tidak terkait identitas.

Berbagai survei yang sudah dirilis ke publik juga relatif mengindikasikan bahwa faktor etnis dan agama mungkin tak terlalu berpengaruh. Hampir semua survei menunjukkan Ahok unggul dibanding nama-nama lain yang mungkin jadi pesaingnya.

Jawaban atas pertanyaan soal pengaruh kedua faktor ini juga menunjukkan hal yang sama. Misalnya, survei Populi Center yang dirilis Februari lalu menemukan bahwa sekitar 73 persen pemilih tidak mempersoalkan etnis dan hampir 50

persen tidak mempersoalkan agama sangcalon gubernur. Namun, sejumlah asumsi dan data umum tersebut belum dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa faktor etnis dan agama tidak akan berpengaruh dalam Pilkada DKI nanti.

Identitas, terutama etnis dan agama adalah faktor yang bersifat laten. Ia ada di hampir semua masyarakat, terutama masyarakat yang multi-kultur seperti DKI. Akan digunakan atau tidak, akan berpengaruh atau tidak, tergantung pada sejumlah kondisi.

Pertama, secara umum, semua survei menunjukkan tingkat popularitas yang sangat tinggi (hampir 100 persen) dan tingkat kepuasan yang juga tinggi (60-85 persen) terhadap petahana. Di pilkada daerah lain, bila popularitas dan tingkat kepuasan kinerja petahana mencapai level tersebut, biasanya petahana menjadi kandidat yang dominan. Namun angka elektabilitas spontan (top of mind) dari petahana DKI maksimal di angka 50-an persen.

Meskipun ini angka yang cukup aman bagi petahana bila bisa bertahan sampai akhir, namun tetap menunjukkan ada gap yang besar dengan popularitas dan tingkat kepuasannya. Seperti di kebanyakan daerah lain, umumnya pemilih Jakarta tidak mempersoalkan etnis calon kepala daerah (70 persen). Namun, untuk etnis yang berbeda dengan etnis mayoritas, kita harus berhati-hati membaca data ini.

Di Amerika Serikat, para peneliti perilaku memilih (voting behavior) mengenal teori atau fenomena "Bradley Effect." Ini soal para kandidat non-kulit putih dalam Pemilu Amerika Serikat yang seringkali unggul dalam survei, tapi kalah dalam pemilu sesungguhnya. Fenomena ini mulai jadi

perhatian ketika Tom Bradley, kandidat berkulit hitam, bertarung dalam pemilihan Gubernur California tahun 1982. Dia diprediksi sangat kuat akan memenangkan kursi gubernur, karena semua survei menunjukkan hal tersebut.

Pemenangnya adalah kandidat berkulit putih. Diduga kuat penyebabnya adalah, para pemilih kulit putih dalam survei mengaku tidak mempersoalkan warna kulit kandidat, padahal mereka mempersoalkannya. Dalam survei, mereka tidak ingin dianggap rasis atau kurang liberal/demokratis. Bisa saja fenomena yang sama terjadi dalam Pilkada DKI. Yang mungkin menunjukkan juga adanya pengaruh identitas adalah elektabilitas petahana yang masih rendah di kalangan Muslim (19 persen - SMRC, Oktober 2015), dan hampir 50 persen pemilih yang menginginkan gubernur beragama Islam (Populi Center, Februari 2016).

Sejumlah indikasi ini seolah menjelaskan mengapa ada gap yang cukup besar antara popularitas dan kepuasan kinerja petahana dengan elektabilitas (terutama top of mind), padahal pesaing yang jelas belum ada. Posisi Ahok sebagai petahana, mungkin dapat mengurangi kemungkinan pengaruh faktor etnis dan agama tersebut. Argumen yang bisa diajukan mungkin adalah argumen kinerja, yang mungkin akan diterima oleh pemilih Jakarta yang dianggap lebih rasional, terdidik dan kritis.

Pada Pilkada DKI putaran kedua para kandidat calon masing-masing merepresntasikan siapa yang mendukungnya, apakah mereka merepresntasikan partai tertentu, atau kelompok ras tertentu atau keyakinan agama tertentu. Kiranya pada pemilihan Pilkada DKI hal itu ikut

mewarnainya ada beberapa hal yang akan menguatkan argumen tersebut, salah satunya secara jelas kita dapat melihat bahwa salah satu kandidat dari petahana yaitu Ahok ia secara sadar atau tidak ia merepresentasikan partai-partai yang mendukungnya dan kebanyakan yang mendukungnya adalah mereka yang seetnis dan sekeyakinan, sebaliknya pasangan kandidat Anis dan Sandi mayoritas pendukungnya adalah masyarakat yang seras dan seagama juga partai-pengusungnya juga partai-partai yang cenderung bermuatan Islam.

Kasus representasi politik pada Pilkada DKI dapat kita analisis dari terjadinya beberapa fenomena yang telah kita saksikan sebelum Pilkada DKI yang ikut merongrong mempengaruhinya seperti halnya kejadian 212 yang dipelopori oleh FPI yang kemudian didukung oleh beberapa ormas Islam termasuk MUI hal itu dilatar belakangi oleh dugaan penistaan yang dilakukan oleh Ahok terkait pidatonya di Kepulauan seribu. Fenomena 212 adalah demo yang dilakukan oleh umat Islam yang berdampak juga terhadap perpolitikan di DKI dan itu terbukti dengan kalahnya Ahok yang jika dilihat dari data-data yang disampaikan oleh beberapa media elektabilitasnya cukup tinggi mampu dikalahkan oleh pasangan Anis-Sandi.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi pada proses Pilkada DKI adalah faktor agama. Walaupun peranan agama bukan hal yang signifikan dalam proses Pilkada tersebut. tetapi Agama seringkali dijadikan alat politisasi yang ampuh untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan pilihannya. Jika didasarkan pada kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pilkada

Jakarta 2017 menunjukkan adanya peningkatan intensitas kampanye berbasis politik identitas, khususnya etnis dan agama. Sementara pemilih yang memilih didasarkan agama hanya 3,6%. (Kompas.com, 2017).

Dengan demikian kita dapat melihat ada orientasi politik yang mengarah kepada identitas ekonomi, agama dan ras. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Pilkada DKI putaran kedua yang dimenangkan oleh Anis-sandi. Hal tersebut tidak luput dari pengaruh politik identitas primordial terkait etnis tionghoa dan agama. Ada beberapa fenomena yang melatarbekangi naik turunnya elektabilitas calon kandidat yang maju putaran kedua. Jika dicermati masing-masing dari kedua pasangan calon keduanya memerankan identitas masing-masing. Pasangan kandidat Ahok-Djarot memainkan identitas tionghoa dan sekaligus menjadi representasi dari ekonomi, ras dan Agama tionghoa yang beragama katolik. Pasangan tersebut mengalami penurunan elektabilitas ketika dihadapkan pada kasus Ahok yang terjerat hukum penistaan agama. Sedangkan pasangan Anis-sandi mereka memerankan identitas ekonomi, ras dan agama Islam. secara ekonomi, etnis dan agama Anis-Sandi merepresentasikan bangsa arab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan demikian dari uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perhelatan politik pada Pilkada DKI putaran kedua tidak luput dari orientasi politik identitas dan representasi. Adapun bentuk orientasinya mengarah kepada orientasi ekonomi, agama dan ras. Ada beberapa alasan peneliti berkesimpulan

demikian, pertama; peneliti mengamati elektabilitas pasangan calon pada Pilkada DKI putaran kedua melalui data-data yang disampaikan oleh beberapa lembaga survey yang menghasilkan bahwa elektabilitas dari kedua kandidat mengalami fluktuasi hal ini dipengaruhi oleh beberapa kasus yang ikut mewarnai perhelatan politik di DKI tersebut. Seperti halnya kasus yang terkait etnis dan Agama sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas. Selain itu lebih jelas lagi terlihat pada kemenangan pasangan calon Anis-Sandi yang memenangkan pemilihan putra kedua. Hal itu pun tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatar belakungnya, seperti adanya aksi damai 212 terkait kasus hokum yang menjerat Ahok.

Saran

Secara objektif penelitian ini mengkaji fenomena sosial yang terjadi

di tengah masyarakat akibat menguatnya orientasi politik identitas primordial ekonomi, etnis dan agama. Etnis dan agama sering kali di jadikan orientasi politik untuk mencapai kemenangan dalam pertarungan politik para elit politik, fenomena Pilkada DKI juga tidak luput dari representasi politik yang ikut mewarnai perhelatan politik di DKI Jakarta tersebut. Hal tersebut seharusnya menjadi bahan perhatian kita apakah proses demokrasi mesti akan seperti ini?.

Perlu di ingat bahwa orientasi politik kearah identitas dan representasi politik yang melibatkan ekonomi, ras dan agama merupakan hal yang membahayakan. Hal itu dikarenakan akan menodai proses demokrasi di Indonesia. Proses demokrasi yang telah dinodai oleh hal semacam itu akan mengakibatkan hilangnya fungsi demokrasi itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ana Sabhana dan Suryani. 2016. Politik Identitas dan Nasionalisme Kebangsaan, Jakarta:LP2M Uin Syarif Hidayatullah
- Castells, Manuel. 2003. The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural, Vol II, Australia: Blacwell Publishing.
- Cressida Heyes. 2007. Identity Politic. Amerika Serikat: Stanford Encyclopedia of Philosophy.
- Fukuyama, Francis. 2005. Memperkuat Negara; Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nuri Suseno. 2013. Representasi Politik. Jakarta: Puskapol FISIP UI
- Abdillah S., Ubed. 2002. Politik Identitas : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Yayasan Indonesiatera
- Yuanzhi, Kong, Silang Budaya Tiongkok-Indonesia, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005.

Jurnal:

- Harvey, Campbell R. March 1991. "The World Price of Covariance Risk". Journal of Finance. page 111-157
- Sukamto, 2010. Politik Identitas (Suatu Kajian Awal dalam Kerangka dan interaksi "Lokalitas dan Globalisasi"). Jurnal Sejarah dan Budaya Universitas Malang. Vol.2

Website:

<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/11072991/.ahok.effect.dan.kajian.lipi.soal.kampanye.politik.identitas.di.indonesia> diakses 20 Januari 2018

<http://www.klikanggaran.com/opini/perang-identitas-ekonomi-politik-di-pilkada-dki-jakarta-bagian-1.html>. diakses 20 Januari 2018

<https://www.kompasiana.com/lessy/pilkada-dki-jakarta-demokrasi-dan-runtuhnya-politik-identitas>. diakses 20 Januari 2018

<https://news.detik.com/kolom/d-3516295/pilkada-politik-identitas-dan-pil-pahit-demokrasi>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018

<https://www.kompasiana.com/benjaminrasjid/59f09e7098182734ac2ed553/meritokrasi-politik-dan-politik-identitas-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018

<http://news.liputan6.com/read/2497842/opini-pilkada-dki-dan-bradley-effect>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018.